



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(LPPD)**

**DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN PASANGKAYU
PROPINSI SULAWESI BARAT
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Data Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Ketahanan Pangan 2021 dapat dirampungkan.

Penyusunan LPPD ini memuat data ringkasan urusan wajib, fungsi penunjang urusan pemerintahan dan urusan pemerinahan umum Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2021

Kami berharap LPPD ini dapat menjadi salah satu bahan evaluasi terhadap kegiatan dan kinerja yang telah dilaksanakan, selanjutnya menjadi pertimbangan dalam penyusunan dan pelaksanaan program dalam rangka penyelenggaran pemerintahan yang lebih baik.

Segala saran dan kritikan kami terima untuk kesempurnaan penyusunan LPPD pada tahun – tahun mendatang.

Dengan tersusunnya LPPD ini kami mengucapkan terima kasih kepada pihak – pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya LPPD ini.

Pasangkayu, Januari 2022

Kepala Dinas



INSAN, S.Sos

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 196412121983061001

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai negara dengan sebagian besar penduduk bekerja pada sektor pertanian, Indonesia hendaknya mewujudkan sektor pertanian sebagai unggulan (basis) ekonomi nasional demi peningkatan kesejahteraan rakyat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dan sekaligus sebagai sektor penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah adalah dengan mengembangkan potensi/komoditas pangan unggulan.

Penyelenggaraan urusan pangan di Indonesia diatur melalui undang-undang pangan Nomor 18 Tahun 2012 yang dibangun berdasarkan kedaulatan dan kemandirian pangan. Urusan Ketahanan Pangan secara substansial ditujukan untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, serta Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan berfungsi menjamin ketersediaan pangan dan melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat serta menjamin seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Bidang konsumsi dan Keamanan Pangan berfungsi mengarahkan pada pola pemanfaatan pangan yang memenuhi kaidah mutu, keragaman, kandungan gizi, keamanan dan kehalalannya.

1.1.1. Gambaran Umum OPD Dinas Ketahanan Pangan

Dinas Ketahanan Pangan sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah, yang menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan khususnya pada bidang ketahanan pangan, tentu memiliki kelembagaan.

Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara disusun dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Kemudian Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara menjabarkan dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara. Struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggungjawab kepada Bupati Mamuju Utara dan selama pelaksanaan tugasnya Kepala Dinas berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Distribusi dan Cadangan Pangan dan Konsumsi serta keamanan Pangan yang sesuai dengan Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Rincian Tugas Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju Utara. Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Distribusi dan Cadangan Pangan dan Konsumsi serta keamanan Pangan;
- b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Distribusi dan Cadangan Pangan dan Konsumsi serta keamanan Pangan;
- c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Distribusi dan Cadangan Pangan dan Konsumsi serta keamanan Pangan;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

Struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, membawahi :
 1. Seksi Ketersediaan Pangan
 2. Seksi Sumberdaya Pangan

3. Seksi Kerawanan Pangan
- d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, membawahi :
 1. Seksi Bidang Distribusi Pangan
 2. Seksi Bidang Harga Pangan
 3. Seksi Bidang Cadangan Pangan
- e. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahi :
 1. Seksi Konsumsi Pangan
 2. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan
 3. Seksi Keamanan Pangan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional
 1. Analisis Ketahanan Pangan
 2. Analisis Pasar Hasil Pertanian
 3. Pengawas Mutu Hasil Pangan

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan



b. Program dan Kegiatan

Dalam rangka percepatan peningkatan ketahanan pangan pangan, Pada Tahun Anggaran 2021 Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan berbagai Porgram dan Kegiatan sebagai Berikut :

Tabel 1. Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2021

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1	2				3
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				02	Kordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
				03	Kordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
				04	Kordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
				05	Kordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
				06	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
				01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				05	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				07	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran
2	09	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
				06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah
				05	Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan
				06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
				08	Fasilitasi Kunjungan Tamu
				09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi SKPD
2	09	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
				04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah

				01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas
				02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilitasi Pasokan dan Harga Pangan
				01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
				04	Pemantauan Stok Pasokan dan Harga Pangan
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
				02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal
				03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per kapita per tahun
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
				05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 1 memperlihatkan Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan TA. 2021 yang terdiri dari Program penunjang dan program prioritas, adapun program penunjang sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sedangkan program prioritas sebagai program pelaksanaan urusan yang meliputi :

- a. Program Peningkatan Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- b. Program Pengawasan Keamanan Pangan
- c. **Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional**

Jumlah pegawai Dinas Ketahanan Pangan sebanyak 21 orang. Berdasarkan Kaulifikasi pendidikan pegawai Dinas Ketahanan Pangan terdiri dari 5 orang berkualifikasi Pendidikan S2, 14 orang S1, 1 orang D3 dan 1 orang berkualifikasi SLTA, sedangkan berdasarkan Pangkat dan Golongan ruang terdiri dari 1 orang Pembina Utama Muda golongan/ruang IV/c, 5 orang berpangkat Pembina gol/ruang IV/a, 8 orang berpangkat Penata Tk. I golongan/ruang III/d, 4 orang berpangkat Penata golongan ruang III/c, , 2 orang berpangkat Penata Muda gol/ruang III/a, 1 orang berpangkat Pengatur golongan/ruang II/c. Adapun

Jumlah pegawai Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Ruang dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2. Rekapitulasi Jumlah Pegawai
Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Pangkat Golongan/Ruang
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2021

I.		Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan		Jumlah
1.	S2			5
2.	S1			14
3.	D3			1
4.	SLTA			1
Jumlah				21
II.		Berdasarkan Pangan dan Golongan/Ruang		Jumlah
		Pangkat	Golongan/Ruang	
1	Pembina Utama Muda		IV/c	1
2	Pembina		IV/a	5
3	Penata Tk. I		III/d	8
4	Penata		III/c	4
5	Penata Muda		III/a	2
6	Pengatur		II/c	1
Jumlah				21

Dalam Struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju Utara terdapat 16 posisi jabatan struktural, yang terdiri dari 1 posisi Eselon II.B (Kepala Dinas), 1 posisi Eselon III.A (Sekretaris Dinas), 3 posisi Eselon III.B (Kepala Bidang), 11 posisi Eselon IV.A (Kasubag dan Kepala Seksi) serta terdapat 3 jenis jabatan fungsional yakni Analisis Ketahanan Pangan, Analis Pasar Hasil Pertanian dan Pengawas Mutu Hasil Pertanian. Dari 16 posisi jabatan structural, 1 posisi eselon III B dan 1 posisi jabatan Eselon IV A lowong. Adapun Jabatan fungsional belum terisi atau masih lowong. Rekapitulasi jumlah pegawai berdasarkan jabatan structural dan fungsional dapat dilihat pada Tabel Berikut :

Tabel 3. Rekapitulasi Jumlah Pegawai
Berdasarkan Jumlah Jabatan Struktural dan Fungsional
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2021

No.	Menurut Kelompok Jabatan			
I.	Tenaga Struktural	Eselon	Jumlah Jabatan Dalam Struktur	Jumlah Jabatan yang Terisi
	1. Kepala Dinas	II.B	1	1
	2. Sekretaris Dinas	III.A	1	1
	3. Kepala Bidang	III.B	3	2
	4. Kepala Seksi/Kasubag	IV.A	11	10
	Jumlah		16	14
II.	Tenaga Fungsional			
	1 Analisis Ketahanan Pangan		1	0
	2 Analisis Pasar Hasil Pertanian		1	0
	3 Pengawas Mutu Hasil Pertanian		1	0
	Jumlah		3	0
III.	Total (I + II)		19	14

Seluruh pejabat struktural Dinas Ketahanan Pangan telah memenuhi persyaratan kepangkatan dimana untuk Kepala Dinas berpangkat Pembina Utama Muda/IV.c, Sekretaris Dinas berpangkat Pembina IV/a, Kepala Bidang 2 orang berpangkat Pembina/IV.a, sedangkan kasubag/kepala seksi terdiri dari 2 berpangkat Pembina IV/a, 7 orang berpangkat Penata Tk. I/III.d, 1 orang berpangkat Penata/III.c.

Dari 16 Pejabat Struktural yang ada pada Dinas Ketahanan Pangan 2 orang Pejabat Eselon III belum mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat Tiga dan sebanyak 5 orang pejabat Eselon IV belum mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk. IV. Jumlah Pejabat bersarkan Diklat structural dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4. Jumlah Pejabat Berdasarkan Diklat Struktural
Dinas Ketahanan Pangan
Tahun 2021

NAMA JABATAN (SESUAI PERDA)***)	STATUS JABATAN**)		PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL				JUMLAH
	ISI	KOSONG	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV	
Kepala Dinas	V			1	1	1	1
Sekretaris Dinas	V					1	
Kasubag Keuangan dan Penyusunan Program	V					1	1
Kasubag Umum dan Kepegawaian	V					1	1
Kabid Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	V				1	1	1
Kasi Ketersediaan Pangan	V					1	1
Kasi Sumberdaya Pangan	V						1
Kasi Kerawanan Pangan		V					
Kabid Distribusi dan Cadangan Pangan		V					
Kasi Distribusi Pangan	V						1
Kasi Harga Pangan	V						1
Kasi Cadangan Pangan	V					1	1
Kabid Konsumsi dan Keamanan Pangan	V					1	1
Kasi Konsumsi Pangan	V					1	1
Kasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan	V						1
Kasi Keamanan Pangan	V						1
TOTAL	14	2	0	1	2	9	14

d. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan pada tahun 2021 sebesar Rp. 2.950.441.312,- dengan Total realisasi belanja sebesar Rp. 2,633,798,022,- atau sebesar 89,27 %. Rincian Alokasi dan Realisasi Anggaran sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5. Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2021

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	
						Rp.	Rp.	%
1	2				3	4	5	6
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			
2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,943,955,162	1,926,621,872	99.11
2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13,316,700	12,116,700	90.99
				01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5,586,600	4,686,600	83.89
				02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,106,950	806,950	72.90
				03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,106,275	1,106,275	100.00
				04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1,106,275	1,106,275	100.00
				05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1,106,275	1,106,275	100.00
				06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,304,325	3,304,325	100.00
2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,580,001,001	1,564,618,819	99.03
				01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,575,080,901	1,560,298,719	99.06
				05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2,460,050	2,160,050	87.81
				07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	2,460,050	2,160,050	87.81
2	09	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	16,060,313	16,060,313	100.00
				06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16,060,313	16,060,313	100.00
2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	122,584,500	122,184,500	99.67
				05	Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	6,656,500	6,656,500	100.00
				06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7,200,000	7,200,000	100.00
				08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9,800,000	9,400,000	95.92
				09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi SKPD	98,928,000	98,928,000	100.00
2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	159,350,898	159,081,790	99.83
				01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,750,010	5,716,940	99.42
				02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	46,572,000	46,374,000	99.57
				04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	107,028,888	106,990,850	99.96

2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	52,641,750	52,559,750	99.84
				01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas	46,699,750	46,617,750	99.82
				02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5,942,000	5,942,000	100.00
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	941,981,775	642,821,775	68.24
2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilitasi Pasokan dan Harga Pangan	232,401,775	82,821,775	35.64
				01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	184,963,995	35,383,995	19.13
				04	Pemantauan Stok Pasokan dan Harga Pangan	47,437,780	47,437,780	100.00
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angkak Kecukupan Gizi	709,580,000	560,000,000	78.92
				02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal	560,000,000	560,000,000	100.00
				03	Koordinasi dan Singkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per kapita per tahun	149,580,000	-	0.00
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	64,504,375	64,354,375	99.77
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	64,504,375	64,354,375	99.77
				05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	64,504,375	64,354,375	99.77
TOTAL						2,950,441,312	2,633,798,022	89.27

e. Sarana dan Prasarana

Secara Umum Sarana dan Prasarana pendukung pada Dinas Ketahanan Pangan 2021 sudah cukup memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai target sasaran pembangunan Ketahanan Pangan. Nilai Aset Tetap Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021 sebesar Rp. 1.332.499.183,-

1.1.2. Rencana Strategis Perangkat Daerah Terhadap RPJMD

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah terdapat dokumen perencanaan yang saling terkait antara lain RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, RKA dan DPA. Singkronsasi antara dokumen perencanaan tersebut sangat

penting dalam rangka konsistensi perencanaan dan pencapaian sasaran pembangunan.

Dalam dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021 terdapat 3 program, 10 kegiatan dan 26 sub kegiatan. Seluruh Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut semua sesuai dan termuat dalam RKA dan Renja SKPD. Namun Karena adanya penyesuaiaan anggaran dalam rangka refocusing, terdapat 2 Sub Kegiatan yang tidak dilaksanakan karena seluruh anggarannya masuk dalam anggaran yang difokusin.. Keterkaitan program yang termuat dalam dokumen perencanaan termuat dalam table berikut :

Tabel 6. Daftar Nama Program dalam RKPD, Renja, RKA dan DPA Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2021

NO	RKPD	RENJA	RKA	DPA
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
2	Program Penigkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program Penigkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program Penigkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program Penigkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
3	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan

BAB II. CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

2.1. Capaian Kinerja Perangkat Daerah

2.1.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Adapun Indikator dan Capaian Indikator Kinerja Kunci Keluaran urusan Pemerintahan Bidang Pangan dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 7. Indikator Kinerja Kunci Keluarga dan Capaian Kinerja Tahun 2021

	IKK KELUARAN	CAPAIAN KINERJA
1.	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Gudang Bulog, Gudang Randomayang dan bangunan Lumbung Pangan Masyarakat (3 unit)(Desa Kasoloang, Bambalamotu dan Pasangkayu)
2.	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Tidak Ada
3.	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Tidak Ada
4.	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan komumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Terdapat 8 Kelompok penerima Manfaat kegiatan Pekarangan Pangan Lestari
5.	Tertanganinya kerawanan pangan	Tidak Ada Penanganan Khusus Rawan Pangan
6.	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada Peta ketahanan dan kerentanan pangan
7.	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Tidak Ada panyaluran cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan
8.	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Pengawasan Keamanan pangan segar dilakukan di 12 Pasar kecamatan

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan indikator kinerja kunci keluaran serta capaiannya masing-masing sebagai berikut :

- a. **Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpangan cadangan pangan.** Di Kabupaten Pasangkayu terdapat beberapa infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpangan cadangan pangan dalam bentuk bangunan lumbung pangan mayarakat, yang diperlihatkan pada tabel berikut :

Tabel 8. Infrastruktur Pergudangan dan Sarana Pendukung Lainnya Untuk Penyimpanan Cadangan Pangan

No.	Jenis Infrastuktur/Sarana	Jumlah	Alamat	Keterangan
1.	Gudang Bulog	1 unit	Kelurahan Martajaya Kec. Pasangkayu	Aset Bulog
2.	Gudang	1 unit	Desa Randomayang Kec. Bambalamotu	Aset Propinsi Sulbar
3.	Lumbung Pangan Masyarakat	3 unit	Kel. Pasangkayu, Kel. Bambalamotu, Desa Kasoloang	Aset Kelompok Tani

b. Tersalurkannya Pangan Pokok dan Pangan Lainnya

Pada tahun anggaran 2021 tidak ada pengadaan pangan pokok dan pangan lainnya.

c. Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang

Pada Tahun Anggaran 2021 kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Pekarangan Pangan Lestari. Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan pembinaan terhadap kelompok-kelompok wanita tani dalam rangka memberikan pengetahuan dan keterampilan dan motivasi dalam rangka perubahan sikap dan perilaku untuk melakukan pengembangan pangan melalui pemanfaatan pekarangan yang dilakukan dalam bentuk pertemuan kelompok dan pemberian bantuan bibit sayuran, yang pada akhirnya diharapkan dapat mendukung pemenuhan pangan yang beragam, bergizi dan seimbang serta dapat membantu ekonomi keluarga dan mendukung ketahanan pangan daerah. Terdapat 8 kelompok wanita

tani yang diberikan pembinaan dan bantuan bibit Sayuran sebagai berikut :

Tabel 9. Kelompok Penerima Manfaat Kegiatan
Pekarangan Pangan Lestari Tahun Anggaran 2021

No.	Nama Kelompok	Alamat	
		Desa	Kecamatan
1	Kwt. Nosampesuvu	Sarude	Sarjo
2	Kwt. Mawar	Kasoloang	Bambaira
3	Kwt. BungaTeratai	Pakawa	Pasangkayu
4	Kwt. Jaya Bersama	Makmur Jaya	Tikke Raya
5	Kwt. AnggrekHijau	Lelejae	Bulutaba
6	Kwt. Permata Indah	Motu	Baras
7	Kwt. Lestari Desa	Kumasari	Sarudu
8	Kwt. Melati	Dapurang	Dapurang

d. **Tersedianya Regulasi Harga minimum daerah untuk pangan lokal.**

Pada tahun anggaran 2021 tidak ada pembuatan regulasi tentang harga minimum daerah untuk pangan lokal.

e. **Tertanganinya Kerawanan Pangan**

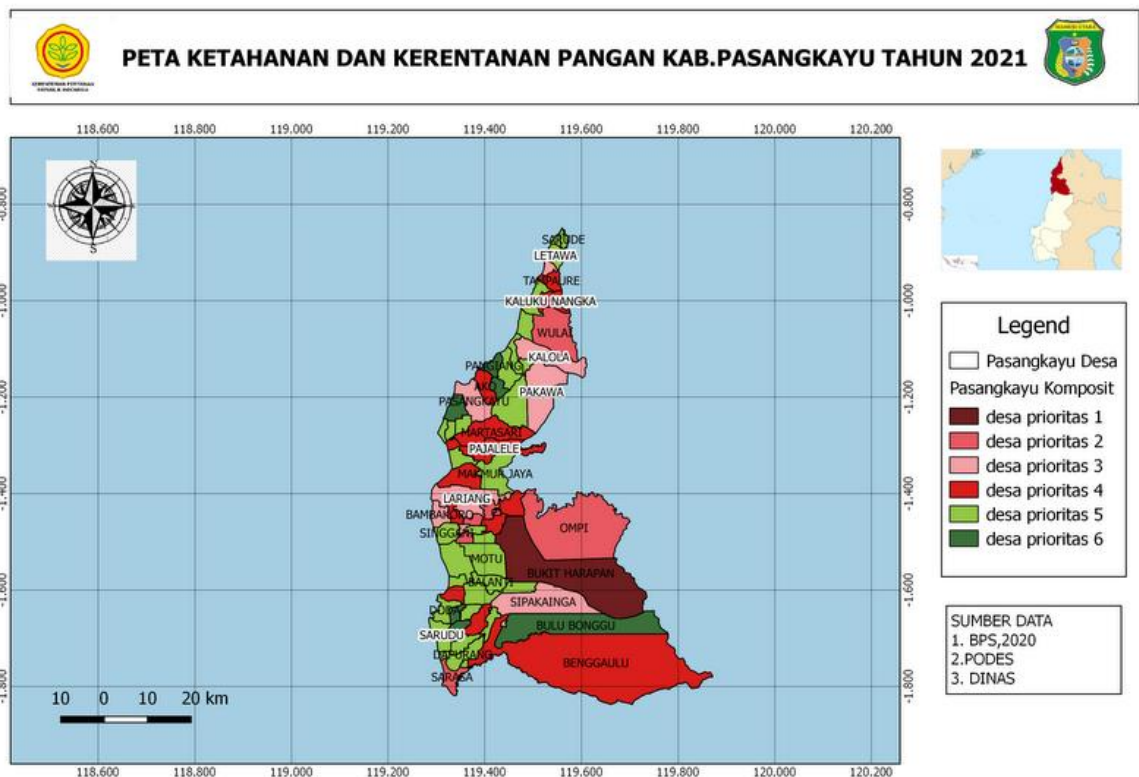
Pada Tahun Anggaran 2021 tidak ada penanganan khusus kerawanan pangan.

f. **Tersedianya peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan**

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan.

Adapun Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pasangkayu sebagai berikut :

Gambar 2. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021



Tabel 10 Rasio Jumlah Desa berdasarkan Prioritas

Prioritas	Jumlah Desa	Persentase
1	1 Desa	1,58
2	7 Desa	11,11
3	8 Desa	12,69
4	12 Desa	19,04
5	29 Desa	46,03
6	6 Desa	9,52

Desa rentan terhadap kerawanan pangan prioritas 1 terdapat di wilayah Kecamatan Bulutaba. (1 desa yaitu Desa Bukit Harapan).

Desa rentan terhadap kerawanan pangan prioritas 2 terdapat di wilayah Kecamatan Dapurang(1 desa), Kecamatan Bulutaba (3 desa), Kecamatan Lariang (2 desa), Kecamatan Bambalamotu (1 desa)

Desa rentan terhadap kerawanan pangan prioritas 3 terdapat di wilayah Kecamatan Duripoku (1 desa), KecamatanLariang (2 desa), KecamatanTikke(1 desa), Kecamatan Bambalamotu (1 desa), Kecamatan Pasangkayu (2 desa) dan Kecamatan Sarjo (1 desa).

g. Tersalurkannya Cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan

Pada Tahun tahun 2021 tidak ada pengadaan dan penyaluran cadangan pangan ke daerah rentan rawan pangan

h. Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar

Pengawasan Keamanan Pangan Segar dilakukan melalui kegiatan pengambilan dan pengujian sampel terhadap bahan pangan segar untuk melihat ada tidaknya pangan segar yang terkontaminasi bahan residu pestisida, pewarna sintetis, formalin dan boraks untuk dalam rangka peningkatan mutu dan keamanan pangan. Kegiatan ini dilakukan pengujian terhadap sampel bahan pangan antara lain cabe kecil, wortel, tomat, paria, cabe keriting, ketimun, kacang panjang, kol, sawi tahu, tempe, paria, kangkung , terong, bayam, yang sampelnya diambil di 12 pasar dari 12 kecamatan se Kabupaten Pasangkayu. Hasil pengujian menunjukkan bahwa semua sampel yang diuji tidak ada yang terindikasi terkontaminasi pestisida, pewarna sintetis, formalin dan borax.

2.1.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil

Indikator Kinerja Kunci Hasil pada Urusan Pemerintahan Bidang pangan di Kabupaten adalah persentase ketersediaan pangan yang diukur dari jumlah ketersediaan cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten melalui APBD. Adapun indikator kinerja kunci hasil dan capaian kinerja pada tahun anggaran dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 11. Indikator dan Capaian Kinerja Kunci Hasil Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021

IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	-	Tidak ada Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten TA. 2020

Dari table tersebut dapat dilihat bahwa tidak terdapat cadangan pangan dalam bentuk beras/jagung yang diadakan oleh pemerintah Kabupaten dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan. Hal ini disebabkan Karena belum adanya alokasi anggaran untuk pengadaannya.

2.1.3. Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras dan atau Jagung Sesuai Kebutuhan) dengan rumus sebagai berikut :

Rumus/Persamaan untuk menghitung cadangan pangan (beras) sebagai berikut :

Jumlah Cadangan Pangan (beras)/Jumlah Kebutuhan Pangan x 100 %

Untuk tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Pasangkayu tidak mengalokasi anggaran untuk pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten sehingga Jumlah cadangan pangan (beras) kabupaten Pasangkayu tidak ada atau 0

Sehingga Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan) sama dengan 0.

Tabel 12. Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

NO	IKK OUPUT		IKK OUTCOME	RUMUS/ PERSAMAAN	BOBOT
9.	1.	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras dan Atau Jagung Sesuai Kebutuhan)	$\frac{\text{Jumlah Cadangan Pangan}}{\text{Jumlah Kebutuhan Pangan}} \times 100\%$	Tidak Ada Pengadaan Cadangan Pangan Permerintah Kabupaten
	2.	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya			= 0 %
	3.	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal			
	4.	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan komumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang			
	5.	Tertanganinya kerawanan pangan			
	6.	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan			
	7.	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan			
	8.	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar			

2.2. Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

2.2.1. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan suatu perwujudan kesepakatan kinerja antara pimpinan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah, sehingga diharapkan adanya kontrak perjanjian yang menjadi acuan dalam mengukur kinerja suatu instansi. Perjanjian kinerja memuat penetapan kinerja suatu instansi pada tahun berkenaan, dengan indikator dan target capaian dari setiap sasaran strategis, program dan kegiatan setiap SKPD. Dokumen Penetapan kinerja akan menjadi acuan untuk memantau, mengendalikan, melaporkan dan menilai realisasi capaian kinerja dan keberhasilan setiap instansi pemerintah. Adapun

penetapan kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun anggaran 2021 dapat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 13. Penetapan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021

NO	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah		
		Jumlah KWT Penerima Manfaat - Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan	8 kelompok
		Jumlah Dokumen Database Potensi Produk Pangan yang Disusun	1 Dokumen
		- Jumlah Dokumen Pemantauan Analisis Harga Pangan yang Disusun	1 Dokumen
		- Jumlah Dokumen Analisis Pola Pangan Harapan yang Disusun	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen Analisis Ratio Jumlah - Penduduk Terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan	1 Dokumen
		- Jumlah Pasar yang Menjadi Sasaran Uji Sampel Keamanan Pangan Segar	12 Pasar
2.	Terwujudnya Kinerja Instansi yang lebih baik dari segi pelayanan, SDM dan penyelenggaraan Pemerintahan secara menyeluruh	Optimalnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %

2.2.2. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

Penetapan kinerja yang merupakan perwujudan perjanjian kinerja antara Kepala Dinas Ketahanan Pangan dengan Bupati Mamuju, hasil perjanjian kinerja ini menjadi acuan pelaksanaan kinerja SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2021. Mengacu atas penetapan kinerja maka dilakukan pengukuran terhadap capaian pelaksanaan kinerja yang telah ditetapkan, sejauh mana pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran capaian kinerja tahun 2021 merupakan parameter dalam mengukur kinerja SKPD yang bersangkutan, dan merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kepala SKPD kepada Bupati dan publik secara umum. Hasil pengukuran capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 14. Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021

NO	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	4	5	6	7
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah				
		- Jumlah KWT Penerima Manfaat Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan	8 KWT	8 KWT	100 %
		Jumlah Dokumen Database Potensi Produk Pangan yang Disusun	1 Dok	1 Dok	100 %
		- Jumlah Dokumen Analisis Harga Pangan	1 Dok	1 Dok	100 %
		- Jumlah Dokumen Analisis Pola Pangan Harapan	1 Dok	0 Dok	0 %
		- Jumlah Dokumen Analisis Ratio Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan	1 Dok	0 Dok	0 %
		- Jumlah Pasar yang Menjadi Sasaran Uji Sampel			

		Keamanan Pangan Segar	12 pasar	12 pasar	100 %
2.	Terwujudnya Kinerja Instansi yang lebih baik dari segi pelayanan, SDM dan penyelenggaraan Pemerintahan secara menyeluruh	Optimalnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	99,24	99,24

2.2.3. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021 diperoleh capaian kinerja sebesar 87,25 % dengan Predikat Kinerja Tinggi sedangkan Kinerja Anggaran sebesar 89,27 % dengan predikat kinerja tinggi. Dibandingkan dengan hasil evaluasi rencana kerja tahun 2020 capaian kinerja mengalami penurunan, dimana capaian kinerja tahun 2020 sebesar 98,40% dan keinerja anggaran sebesar 99,07% dengan predikat kinerja Sangat Tinggi. Untuk lebih jelasnya mengenai perbandingan capaian kinerja tahun 2021 dan 2020 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 15. Perbandingan Capaian Kinerja berdasarkan Hasil Evaluasi Rencana Kerja Tahun 2021 dan 2020

Tahun	Capaian Kinerja		Predikat Kinerja		
	K	Rp	K	Rp	
2021	87,25	89,27	T	T	
2020	98,40	99,07	ST	ST	

BAB III. PENUTUP

3.1. Saran

Berdasarkan hasil penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya urusan pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021, dirumuskan saran sebagai berikut :

1. Perlu penyediaan alokasi anggaran untuk pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten
2. Penanganan daerah rawan dan rentan pangan perlu ditingkatkan
3. Perlu peningkatan pelaksanaan pembinaan, pendampingan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi dan seimbang
4. Pengawasan keamanan pangan segar perlu ditingkatkan

3.2. Rekomendasi

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja urusan pemerintahan bidang pangan maka direkomendasikan hal berikut :

Agar dialokasikan anggaran untuk pengadaan cadangan pangan pemerintah pada tahun anggaran selanjutnya.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2021, sebagai bahan evaluasi dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja selanjutnya.

Pasangkayu, Januari 2022

Kepala Dinas



IHSAN S. SCS

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 196412121983061001

Lampiran 2. Rekapitulasi Jumlah Pegawai
Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Pangkat Golongan/Ruang
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2021

I.	Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan		Jumlah
1.	S2		5
2.	S1		14
3.	D3		1
4.	SLTA		1
Jumlah			21
II.	Berdasarkan Pangan dan Golongan/Ruang		Jumlah
	Pangkat	Golongan/Ruang	
1	Pembina Utama Muda	IV/c	1
2	Pembina	IV/a	5
3	Penata Tk. I	III/d	8
4	Penata	III/c	4
5	Penata Muda Tk. I	III/b	0
6	Penata Muda	III/a	2
7	Pengatur Tk. I	II/d	0
8	Pengatur	II/c	1
9	Pengatur Muda Tk. I	II/b	0
10	Pengatura Muda	II/a	
Jumlah			21

Kepala Dinas
Dinas Ketahanan Pangan


IHGAN. S. Sos
NIP : 196412121993061001

Lampiran 3. Rekapitulasi Jumlah Pegawai
 Berdasarkan Jumlah Jabatan Struktural dan Fungsional
 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasangkayu
 Tahun 2021

No.	Menurut Kelompok Jabatan			
I.	Tenaga Struktural	Eselon	Jumlah Jabatan Dalam Struktur	Jumlah Jabatan Terisi
	1. Kepala Dinas	II.B	1	1
	2. Sekretaris Dinas	III.A	1	1
	3. Kepala Bidang	III.B	3	2
	4. Kepala Seksi/Kasubag	IV.A	11	10
	Jumlah		16	14
II.	Tenaga Fungsional			
	1 Analisis Ketahanan Pangan		1	0
	2 Analisis Pasar Hasil Pertanian		1	0
	3 Pengawas Mutu Hasil Pertanian		1	0
	Jumlah		3	0
III.	Total (I + II)		19	14

Kepala Dinas
 Dinas Ketahanan Pangan



INSAN, S.Scs
 NIP.: 196412121983061001

Lampian 4. Jumlah Pejabat Berdasarkan Diklat Struktural
Dinas Ketahanan Pangan
Tahun 2021

NAMA JABATAN (SESUAI PERDA)***)	STATUS JABATAN**)		PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL				JUMLAH
	ISI	KOSONG	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV	
Kepala Dinas	V			1	1	1	1
Sekretaris Dinas	V					1	
Kasubag Keuangan dan Penyusunan Program	V					1	1
Kasubag Umum dan Kepegawaian	V					1	1
Kabid Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	V				1	1	1
Kasi Ketersediaan Pangan	V					1	1
Kasi Sumberdaya Pangan	V						1
Kasi Kerawanan Pangan		V					
Kabid Distribusi dan Cadangan Pangan		V					
Kasi Distribusi Pangan	V						1
Kasi Harga Pangan	V						1
Kasi Cadangan Pangan	V					1	1
Kabid Konsumsi dan Keamanan Pangan	V					1	1
Kasi Konsumsi Pangan	V					1	1
Kasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan	V						1
Kasi Keamanan Pangan	V						1
TOTAL	14	2	0	1	2	9	13

Kepala Dinas
Dinas Ketahanan Pangan



IHSAN S. Sus

NIP : 196412121983061001

Lampiran 5. Pagu dan Realiasi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan TA. 2021

Kode					Nama Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Sumber Dana	Lokasi	Volume	Nilai Pagu Anggaran	Realisasi		
										Fisik	Keuangan	
										(%)	('Rp)	(%)
2					DINAS KETAHANAN PANGAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2	9				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				2,950,441,312.00		2,633,798,022.00	89.27
2	9	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1,943,955,162.00		1,926,621,872.00	99.11
2	9	1	2:01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				13,316,700.00		12,116,700.00	90.99
2	9	1	2:01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DAU	Pasangkayu	2 Dok	5,586,600.00	100	4,686,600.00	83.89
2	9	1	2:01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DAU	Pasangkayu	1 Dok	1,106,950.00	100	806,950.00	72.90
2	9	1	2:01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DAU	Pasangkayu	1 Dok	1,106,275.00	100	1,106,275.00	100.00
2	9	1	2:01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DAU	Pasangkayu	1 Dok	1,106,275.00	100	1,106,275.00	100.00
2	9	1	2:01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DAU	Pasangkayu	1 Dok	1,106,275.00	100	1,106,275.00	100.00
2	9	1	2:01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DAU	Pasangkayu	1 Dok	3,304,325.00	100	3,304,325.00	100.00
2	9	1	2:01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	-	-	-	-	
2	9	1	2:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	-	1,580,001,001.00	-	1,564,618,819.00	99.03
2	9	1	2:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DAU	Pasangkayu	12 bulan	1,575,080,901.00	100	1,560,298,719.00	99.06
2	9	1	2:02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DAU	Pasangkayu	1 Dok	2,460,050.00	100	2,160,050.00	87.81
2	9	1	2:02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	DAU	Pasangkayu	1 Dok	2,460,050.00	100	2,160,050.00	87.81
2	9	1	2:03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		-	-	16,060,313.00	-	16,060,313.00	100.00
2	9	1	2:03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DAU	Pasangkayu	12 bulan	16,060,313.00	100	16,060,313.00	100.00

2	9	1	2:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	-	122,584,500.00	-	122,184,500.00	99.67
2	9	1	2:06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DAU	Pasangkayu	bulan	6,656,500.00	100	6,656,500.00	100.00
2	9	1	2:06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DAU	Pasangkayu	bulan	7,200,000.00	100	7,200,000.00	100.00
2	9	1	2:06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DAU	Pasangkayu	12 bulan	9,800,000.00	100	9,400,000.00	95.92
2	9	1	2:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DAU	Pasangkayu, Mamuju	12 bulan	98,928,000.00	100	98,928,000.00	100.00
2	9	1	2:07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-		-	
2	9	1	2:07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DAU	-	-	-	-	-	
2	9	1	2:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	159,350,898.00	-	159,081,790.00	99.83
2	9	1	2:08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DAU	Pasangkayu	12 bulan	5,750,010.00	100	5,716,940.00	99.42
2	9	1	2:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DAU	Pasangkayu	12 bulan	46,572,000.00	100	46,374,000.00	99.57
2	9	1	2:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DAU	Pasangkayu	12 bulan	107,028,888.00	100	106,990,850.00	99.96
2	9	1	2:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				52,641,750.00		52,559,750.00	99.84
2	9	1	2:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DAU	Pasangkayu	22 unit	46,699,750.00	90,91	46,617,750.00	99.82
2	9	1	2:09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DAU	Pasangkayu	12 bulan	5,942,000.00	100	5,942,000.00	100.00
2	9	3			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				941,981,775.00		642,821,775.00	68.24
2	9	3	2:01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan				232,401,775.00		82,821,775.00	35.64
2	9	3	2:01	1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	DAU	Pasangkayu	2 Dokumen	184,963,995.00	50	35,383,995.00	19.13
2	9	3	2:01	4	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	DAU	Pasangkayu	1 Dokumen	47,437,780.00	100	47,437,780.00	100.00

2	9	3	2:04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi				709,580,000.00		560,000,000.00	78.92
2	9	3	2:04	2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	DAK NON FISIK	Pasangkayu	8 kelompok	560,000,000.00	100	560,000,000.00	100.00
2	9	3	2:04	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	DAU	Pasangkayu	1 Dok	149,580,000.00	0	-	0.00
2	9	5			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				64,504,375.00		64,354,375.00	99.77
2	9	5	2:01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota				64,504,375.00		64,354,375.00	99.77
2	9	5	2:01	5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	DAU	Pasangkayu	1 keg	64,504,375.00	100	64,354,375.00	99.77
JUMLAH									2,950,441,312.00		2,633,798,022.00	89.27

Pasangkayu, 31 Desember 2021


H. H. S. S. S.
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 Nip. 196412121983061001

Lampiran 6. Kesesuaian Program Dalam RKPD, Renja, RKA dan DPA Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021

NO	RKPD	RENJA	RKA	DPA
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
3	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan

Kepala Dinas
Dinas Ketahanan Pangan



IHSAN, S. Sos

NIP : 196412121983061001

LAMPIRAN III.2. FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

KABUPATEN : PASANGKAYU
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KETAHANAN PANGAN
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR (PANGAN)

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis)	1	Penyelenggaraan Urusan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (diluar Program Non Teknis)	1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat - Nilai Anggaran Rp. 941.981.775,- - Realisasi Anggaran Rp. 642.821.775,- 2 Program Pengawasan Keamanan Pangan - Nilai Anggaran Rp.64.504.375,- - Realisasi Anggaran Rp. 64.354.375,--	2 program	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah cq. Kementerian/LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Jumlah Keberdaan SOP	Apabila ada, sebutkan ada sebanyak 7 Yang terdiri dari : 1 SOP tentang Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan 2 SOP tentang Pengembangan Lumbung Pangan Desa 3 SOP tentang Harga Pangan 4 SOP tentang Distribusi Pangan 5 SOP tentang Bimbingan Teknis Pemberdayaan Sumber Daya Pangan Lokal 6 SOP tentang Analisis PPH Ketersediaan 7 SOP tentang Penanganan Daerah Rawan Pangan	Ada7 SOP	
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berakitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	- Apabila Ada sebutkakn -	tidak ada	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (diisi) dibagi Jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 14 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 16	88%	
			5	Keberadaan Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi perangkat daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi perangkat daerah	1. Analis Ketahanan Pangan 2. Analis Pasar Hasil Pertanian 3. Pengawas Mutu Hasil Pertanian	Ada	

4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas perangkat daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS	Jumlah PNS perangkat daerah terhadap Total PNS	- PNS perangkat daerah , sebanyak 21 Personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 3.291	0.64%	
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi Jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim, sebanyak 7 Orang. - Pejabat yang ada, sebanyak 14 Orang.	50%	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 14 Orang. - Jabatan yang ada sebanyak 16 Orang.	88%	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Dokumen dimaksud sebanyak 4 jenis yang terdiri dari : 1 RENSTRA Perangkat Daerah 2 RENJA Perangkat Daerah 3 RKA Perangkat Daerah 4 DPA Perangkat Daerah	4 Jenis dokumen	
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Program RENJA Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	- Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah, sebanyak 3 Program - Jumlah Program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan sebanyak 3 program	100%	
		Sinkronisasi Program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA perangkat daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA perangkat daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah	- Program RENJA perangkat yg diakomodir dlm RKA Perangkat Daerah, sebanyak 3 - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 3 Program	100%	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Program RKA Perangkat Daerah yg diakomodir dlm DPA Perangkat Daerah, sebanyak 3 Program - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 3 Program	100%	
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi Anggaran	13	Anggaran belanja Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran belanja Perangkat Daerah dibagi Total APBD x 100%	- Total anggaran belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 2.950.441.312,- - Total belanja APBD, sebesar Rp. 888.718.516.063.15,-	0.22%	

		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi belanja Perangkat Daerah dibagi Total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 2.633.798.022,- - Total Realisasi belanja APBD sebesar Rp. 821.733.766.608,57	0.32%	
		Besaran belanja langsung dan tidak langsung	15	Total belanja langsung dari total belanja perangkat daerah	Total belanja langsung dari total belanja perangkat daerah x 100 %	- Realisasi belanja langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 1.560.298.719,- - Total Realisasi belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 2.633.798.022,-	59.24%	
			16	Total belanja tidak langsung dari total belanja perangkat daerah	Total belanja tidak langsung dari total belanja perangkat daerah x 100 %	- Realisasi belanja tidak langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 1.073.499.303,- - Total Realisasi belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 2.633.798.022,-	40.76%	
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca,LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Apabila ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 5 Jenis, sbb : 1 LRA 2 Neraca 3 CaLK 4 LO 5 LPE	Ada, sebanyak 5 jenis	
	7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						
		Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila ada, sebutkan jenis dokumennya : 1 Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah 2 Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan 3 Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan 4 Kartu Inventaris Barang (KIB) D Jalan, Irigasi dan 5 Kartu Inventaris Barang (KIB) E Aset Tetap 6 Kartu Inventaris Barang (KIB) F Konstruksi dalam 7 Rekapitulasi Buku Penyusutan Barang 8 Buku Inventaris Aset Lainnya 9 Rekapitulasi Buku Inventaris (Rekap Hasil Sensus) 10 Buku Inventaris Aset Tetap 11 Laporan Mutasi Barang 12 Daftar Rekapitulasi Mutasi Barang	Ada	
		Penggunaan asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi Total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100%	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. 0,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebesar Rp. 1.039.565.419,-	0%	

8	PEMBERIAN FASILITAS TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas/prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas/prasarana informasi : 1. Papan pengumuman 2. Pos pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas/prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1 Papan Pengumuman	Jumlah sebanyak 1 Jenis	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Apabila ada, sebutkan survey kepuasan tentang	Tidak Ada	

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN



IHSAN, S.Sos

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. 196412121983061001

Lampiran 8.

TATA PELAKSANA KEBIJAKAN
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2021

DINAS : DINAS KETAHANAN PANGAN

URUSAN YANG DILAKSANAKAN : PANGAN

NO	IKK OUPUT		IKK OUTCOME	RUMUS/PERSAMAAN	BOBOT
9.	1.	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras dan Atau Jagung Sesuai Kebutuhan)	$\frac{\text{Jumlah Cadangan Pangan}}{\text{Jumlah Kebutuhan Pangan}} \times 100\%$	Tidak Ada Pengadaan Cadangan Pangan Permerintah Kabupaten
	2.	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya			
	3.	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pang			= 0 %
	4.	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan komumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang			
	5.	Tertanganinya kerawanan pangan			
	6.	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan			
	7.	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan			
	8.	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar			

KEPALA DINAS



IHSAN, S.Sos

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 196412121983061001

INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN
TAHUN 2021

NO	URUSAN PEMERINTAHAN		IKK KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
9.	PANGAN	1.	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	1. Gudang Bulog (1 unit) (Kelurahan Martajaya) 2. Gudang Randomayang (1 unit) 3. Lumbung Pangan Masyarakat (3 unit)(Desa Kasoloang, Bambalamotu dan Pasangkayu)	Dinas Ketahanan Pangan	Aset Bulog Aset Propinsi Aset Masyarakat (Kelompok Tani)
		2.	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Tidak ada penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya	Dinas Ketahanan Pangan	Tida Ada Pengadaan Pangan Pokok atau pangan lainnya
		3.	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Tidak ada regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Dinas Ketahanan Pangan	
		4.	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan komumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	8 Kelompok penerima Manfaat kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk pengembangan pangan	Dinas Ketahanan Pangan	
		5.	Tertanganinya kerawanan pangan	Tidak Ada Penanganan Khusus Rawan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	
		6.	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada Peta ketahanan dan kerentanan pangan	Dinas Ketahanan Pangan	
		7.	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Tidak Ada panyaluran cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Dinas Ketahanan Pangan	Tidak Ada Pengadaan Cadangan Permerintah Kabupaten
		8.	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Pengawasan Keamanan pangan segar dilakukan di 12 Pasar kecamatan	Dinas Ketahanan Pangan	

KEPALA DINAS

IHSAN S. SOR
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 196412121983061001

Lampiran 9.

INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL
TAHUN 2021

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
9.	Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	0		Tidak ada Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten TA. 2021

KEPALA DINAS



IRISAN, S.Sos
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 196412121983061001

Lampiran 10. PERHITUNGAN JUMLAH CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH (Berdasarkan Permentan Nomor 11 Tahun 2018)

1.	CADANGAN PANGAN TOTAL PROPINSI	=	(0,5% x Jumlah penduduk Propinsi x Konsumsi beras per kapita per tahun)	=	$\frac{0,5 \% \times 1.380.256 \times 111,9 \text{ kg}}{1000}$	=654.931,47 =654,93 ton
2.	Cadangan Beras Pemerintah Propinsi	=	20% X Cadangan Pangan Total Propinsi	=	20% x863,28 ton	= 172,66 ton
3.	Cadangan Beras Pemerintah Kupaten	=	80% x Cadangan Pangan Total Propinsi x rasio jumlah penduduk kabupaten terhadap jumlah penduduk propinsi	=	80% x 863,66 ton x 0,12	= 82,87 ton
4.	Kebutuhan Pangan Kabupaten pasangkayu = Jumlah penduduk x Konsumsi beras perp kapita			=	174.471 jiwa x 111,9 kg/kap/tahun	= 19.523 ton/thn
5.	Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Pangan Beras Jagung Sesuai Kebutuhan)			=	$\frac{0 \times 100 \%}{19,523 \text{ ton}}$	= 0%
Keterangan:						
	- Konsumsi Beras per Kapita per Sulawesi Barat	=	111.9 kg/kap/tahun			
	- Jumlah Penduduk Propinsi Sulawesi Barat	=	1,380,256 jiwa			
	- Jumlah Penduduk Kabupaten Pasangkayu	=	188,861 jiwa			
	- Rasio Jumlah penduduk kabupaten terhadap penduduk propinsi	=	$\frac{174,471}{1,440,000} = 0,12$			

Kepala Dinas,

JHSAN, S.Sos
NIP : 196411211983061001